



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN AKHIR
RENJA

Tahun Anggaran
2024



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/298/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenaan -Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terutama Pasal 78, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah mencakup Renja masing-masing Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RKPD provinsi yang mana merupakan penjabaran setiap tahun dari RPJMD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dimulai sejak minggu pertama bulan Januari Tahun 2023.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang mana RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan bagian satuan tahunan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terdiri dari Bab Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan Penutup. Melalui dokumen Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan; yang terdiri dari target kinerja dan aspek pendanaan dalam rangka pencapaian target dimaksud; dan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan nantinya, serta memberikan “umpan balik” bagi penyusunan Renja berikutnya.

Demikian RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Palangka Raya, 28 Juli 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607271993031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	78
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	88
4.1 Program dan Kegiatan Rencana Kerja dan Pembangunan PD	88
4.2 Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	90
BAB V PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2022	13
2.2	Pencapaian Kinerja Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	21
2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	28
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023	56
3.1	Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	85
4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	92
4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (provinsi) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024 yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD).

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah penjabaran dari Rancangan Awal Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 serta berdasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2005 - 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan dan Perubahan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102)
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang membidangi fungsi kelautan dan perikanan Kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam penyusunan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2024;

- b. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- c. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor Kelautan dan Perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

B.1. Evaluasi Program Tahun 2022

Evaluasi Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dilakukan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan program yang dilaksanakan melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2022 untuk Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian strategis semula berjumlah Rp.35.356.339.000,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp.96.584.191.933,- atau ada penambahan anggaran sebesar Rp.61.227.852.933,- (173,17%). Penambahan anggaran ini dianggarkan untuk pengendalian inflasi dan program strategis Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kalimantan Tengah yaitu Program Shrimp Estate di kabupaten Sukamara. untuk melaksanakan 6 program terdiri dari 1 program bersifat rutin dan 5 program prioritas dengan realisasi keuangan sebesar Rp.42.715.808.587,- atau 44,23 %, sedangkan capaian kinerja fisik sebesar 50%. Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62	159.610,81	119,88
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34	129.685,25*	101,31
		Jumlah produksi benih (ekor)	69.820	70.517*	101,00
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	55,81	56,00*	100,34
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84	35.213,74*	101,30
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2	4,57	142,81
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	2	100,00
7	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85	100	117,65
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif	45	202	448,89

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
		dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)			

Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan kriteria : (i) menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya, (ii) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor di masyarakat, (iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan program SKPD, (iv) dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja SKPD, dan (v) jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan eksistensi dan peran SKPD dalam pembangunan daerah. Hasil indentifikasi permasalahan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah ke depan dijabarkan sebagai berikut:

A. Bidang Perikanan Tangkap

- Usaha Perikanan tangkap didominasi perahu tanpa motor dan Boat bermotor ≤ 5 GT yang menangkap disekitar perairan payau dan laut ≤ 4 Mil (Motorisasi).
- Masih kurangnya sarana dan prasarana Perikanan tangkap.
- Minimnya sarana dan prasarana Perikanan di sentra nelayan.
- Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup khususnya ekosistem terumbu karang dan ikan.
- Padatnya penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah perairan WPP 712 dan rendahnya tingkat kemampuan Kompetitif nelayan setempat masih terjadi konflik sosial diantara nelayan tradisional dan modren.
- Perlunya penataan kelembagaan dan peningkatkan kualitas kemitraan pada kelompok nelayan.

B. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya air tawar dan air payau.
- Kurangnya dukungan permodalan dari perbankan
- Kurangnya tenaga penyuluh Perikanan mengingat tenaga penyuluh yang tersedia pada tingkat kabupaten dan belum sampai per kecamatan.
- Usaha Perikanan budidaya masih mempunyai kendala, kualitas benih dan harga pakan yang tinggi.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap pembudidaya ikan
- Belum adanya zonasi budidaya ikan tawar, payau dan laut

- Adanya penyakit musiman dalam kegiatan budidaya ikan
- Belum optimalnya keahlian yang dimiliki oleh pembudidaya air laut dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam usaha budidaya.
- Jumlah produksi ikan air tawar belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada
- Banyaknya usaha budidaya yang tidak memiliki izin usaha dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menyulitkan dalam hal pengendalian dan pengaturan
- Kurangnya sarana dan prasarana peningkatan daya saing produk perikanan
- Masih sedikit kelompok yang produknya bersertifikasi
- Minimnya produk Pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu
- Kurangnya Pelaku usaha pengolahan yang berkompeten
- Pemasaran yang relatif belum lancar.
- Kurangnya bahan baku dan industri pengolahan lainnya.
- Terbatasnya kemampuan akses informasi teknologi pengolahan.
- Belum termotivasinya nelayan dalam melakukan pengembangan produk hasil perikanan.

C. Bidang Kelautan dan Pesisir

- Kurangnya Kawasan konservasi yang ditetapkan KKP dan belum tersedia RPZ Kawasan Konservasi
- Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola dan pemanfaatan Kawasan laut dan pesisir
- Kurangnya animo pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang laut dan pesisir

D. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Kurangnya SDM Pengawasan : PPNS, Pengawas Perikanan dan Polsus
- Sistem Integrasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum Optimal

B.2. Perkiraan Pencapaian Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Total Belanja Langsung sebesar Rp. 113.343.474.803,- dimana terjadi peningkatan sebesar 17,35 % bila dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung tahun anggaran 2023 Rp. 96.584.191.933,-. Dari total anggaran tahun 2023 tersebut terurai dalam 6 program, diharapkan keberhasilan kinerja

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

dapat mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Pada Tahun 2023 target Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja 2023								
			Target	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	129.685,25	136.140,63	15,47	13.614,06	45,44	68.070,32	75,62	115.719,54	100	
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	159.610,81	137.130,72	20,07	13.713,07	48,6	68.565,36	77,11	116.561,11	100	
1.3	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	56	57,62	28,57	0	57,14	28,81	71,43	48,98	100	
1.4	Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor)	70.517	72.010	14,25	7.201,00	44,42	36.005,00	74,6	61.208,50	100	
1.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	0	109,5	105,57	85,01		54,75		93,08	107	
1.6	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	4,57	3,3	23,06	0,33	47,34	1,65	72,27	2,81	100	
1.7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	100	85	27,58	8,5	56,23	42,50	88,85	72,25	100	
1.8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	202	48	22,22	5	44,44	24,00	77,78	40,80	100	
1.9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	4	0	1	33,33	2,00	83,33	3,40	100	
1.10	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	35.213,74	35.073,68	20,07	3.507,37	48,6	17.536,84	77,11	29.812,63	100	

Untuk mencapai target tersebut, maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi, dengan tujuan:

- Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan

2. Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:

- Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, dengan tujuan:

- Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif

Sedangkan Program teknis strategis yang akan dilaksanakan, untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan III Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 TW II (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			214.789.759.423		32.151.348.945		35.356.339.000	-	1.922.076.755		1.922.076.755,00	-	34.073.425.700,00		15,86
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	35	18.353.000.800	-	5.870.050.800	-	445.000.000	0,09	12.070.000	4,68	12.070.000,00	0,09	5.882.120.800,00	0,27	32,05
	3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah lokasi dalam rangka pengelolaan ruang laut	35	17.353.000.800	2	5.784.333.600	2	150.000.000	0,04	-	2,00	-	2,04	5.784.333.600,00	5,83	33,33
	3 25 02 1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi	5	500.000.000	1	65.787.200	1	150.000.000	0,14	12.070.000	14,07	12.070.000,00	1,14	77.857.200,00	22,81	15,57
	3 25 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir	5	500.000.000	1	19.930.000	1	145.000.000	0,02	-	2,00	-	1,02	19.930.000,00	20,40	3,99
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	149.286,44	87.792.496.785	130.526,10	9.089.638.760	130.526,10	13.947.800.000	3.211,98	56.634.300	2,41	56.634.300,00	133.738,08	9.146.273.060,00	89,58	10,42
Meningkatnya Pendapatan Nelayan			Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	113,25	-	107,00		107,00		-	-		-	107,00		94,48	
	3 25 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut	10	12.852.000.000	2	1.799.231.875	2	217.800.000	0,06	20.526.000	2,95	20.526.000,00	2,06	1.819.757.875,00	20,59	14,16

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 TW II (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3 25 03 1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	5	1.555.200.000	1	9.286.000	1	65.000.000	0,02	-	2,00	-	1,02	9.286.000,00	20,40	0,60
	3 25 03 1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap 10-30 GT yang menjadi kewenangan provinsi	5	1.296.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 25 03 1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi	5	1.296.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 25 03 1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan dalam rangka pendaftaran armada perikanan dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi	5	1.555.200.000	1	15.211.000	1	150.000.000	0,02	296.000	2,20	296.000,00	1,02	15.507.000,00	20,44	1,00
	3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang di kelola dan dibangun	35	64.054.096.785	7	7.265.909.885	7	13.515.000.000	0,16	35.812.300	2,32	35.812.300,00	7,16	7.301.722.185,00	20,46	11,40
	3 25 03 1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	5	1.296.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 TW II (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3 25 03 1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	5	1.296.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 25 03 1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	5	1.296.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 25 03 1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	5	1.296.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	160.537,50	20.873.059.695	119.867,05	2.780.479.650	119.867,05	3.577.480.400	5.688,57	83.970.000	4,44	83.970.000,00	125.555,62	2.864.449.650,00	78,21	13,72
Meningkatnya Kebutuhan Benih			Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)	78.580	-	67.630	-	67.630	-	-	-	-	-	67.630,00	-	86,07	#DIV/0!
	3 25 04 1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	5	432.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 TW II (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3 25 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil	5	432.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 25 04 1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	5	432.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 25 04 1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut	5	432.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kegiatan pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Payau dan Tawar	25	19.145.059.695	4	2.780.479.650	4	3.577.480.400	0,22	83.970.000	4,44	83.970.000,00	4,22	2.864.449.650,00	16,89	14,96
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	90	2.688.205.725	85	1.070.609.680	85	437.503.000	11,32	50.069.500	13,32	50.069.500,00	96,32	1.120.679.180,00	107,02	41,69
Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok)	60	-	40		40		-	-	-	40,00	-	66,67	#DIV/0!	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 TW II (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	15	1.938.205.725	3	1.070.609.680	3	437.503.000	0,40	50.069.500	13,32	50.069.500,00	3,40	1.120.679.180,00	22,66	57,82
	3 25 05 1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan	5	750.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	36.009,20	911.250.000	34.450,00	31.988.000	34.450,00	147.500.000	6.315,53	24.252.000	18,17	24.252.000,00	56.240.000,00	-	6,17	
Meningkatnya Konsumsi Ikan			Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	63,04	-	49,63		49,63		-	-		-	49,63	-	78,73	#DIV/0!
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB			Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,60	-	3,10		3,10		-	-		-	3,10	-	86,11	#DIV/0!
	3 25 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	5	300.000.000	0	-	0	-	-	-		-	-	-	-	-
	3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5	311.250.000	1	31.988.000	1	147.500.000	0,18	24.252.000	18,17	24.252.000,00	1,18	56.240.000,00	23,63	18,07

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 TW II (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3 25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	5	300.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	B	99.790.997.218	B	13.308.582.055	B	16.801.055.600		1.695.080.955	12,69	1.695.080.955,00		15.003.663.010,00		15,04
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat			Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID	16	-	16		16		-	-		-	16,00		-	100,00
	3 25 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	35	3.750.000.000	7	449.123.000	7	803.356.000	0,67	56.922.600	9,59	56.922.600,00	7,67	506.045.600,00	21,92	13,49
	3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tahun layanan administrasi keuangan perangkat daerah	5	48.738.282.205	1	9.667.926.008	1	12.117.732.719	0,14	1.334.989.030	14,43	1.334.989.030,00	1,14	11.002.915.038,00	22,89	22,58
	3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	20	900.000.000	4	109.878.840	4	175.944.000	0,29	9.525.000	7,29	9.525.000,00	4,29	119.403.840,00	21,46	13,27
	3 25 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket layanan kepegawaian perangkat daerah	10	1.150.000.000	2	182.630.000	2	97.000.000	0,04	-	2,00	-	2,04	182.630.000,00	20,40	15,88
	3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tahun layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	2.387.000.000	1	-	1	492.866.000	0,23	100.540.400	23,06	100.540.400,00	1,23	100.540.400,00	24,61	4,21
	3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tahun layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	864.000.000	0	458.637.499	0	-	-	-	2,00	-	-	458.637.499,00	-	53,08
	3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	36.446.423.040	4	2.252.737.430	4	2.530.547.431	0,27	125.852.435	6,66	125.852.435,00	4,27	2.378.589.865,00	21,33	6,53

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 TW II (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	5.555.291.973	4	187.649.278	4	583.609.450	1,27	67.251.490	31,87	67.251.490,00	5,27	254.900.768,00	26,37	4,59

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada indikator kinerja utama serta analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta analisis Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026.

Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra untuk Tahun 2023, antara lain:

- 1) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
- 2) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
- 3) Meningkatnya Kebutuhan Benih
- 4) Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan
- 5) Meningkatnya Konsumsi Ikan
- 6) Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
- 7) Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
- 8) Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku
- 9) Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP
- 10) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel
- 11) Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut diatas maka disusun suatu Rancangan Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 seperti dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Realisasi					2024	2025	2026	PD Penanggung Jawab
				2023								
				Target 2023	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV				
1	2	3	4	5					7	8	9	10
III. Urusan Pilihan												
1 Kelautan dan Perikanan												
1.1	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	119.867,05	129.685,25	136140,6	13.614,06	68.070,32	115719,5		144.272,92	152.405,21	160.537,50	Dislutkan
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	130.526,10	159.610,81	137.130,72	13.713,07	68.565,36	116.561,11		141.244,64	145.481,98	149.486,44	Dislutkan
1.3	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,63	56,00	57,62	-	28,81	48,977		59,43	61,23	63,04	Dislutkan
1.4	Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor)	67.630	70.517	72.010	7.201,00	36.005,00	61.209		74.200	76.390	78.580	Dislutkan
1.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	107		109,5	85,01	54,75	93,075		110.75	112	113.25	Dislutkan
1.6	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,4	4,6	3,3	0,33	1,65	2,8		3,40	3,50	3,60	Dislutkan
1.7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	3	100	85	8,50	42,50	72		85	90	90	Dislutkan
1.8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	85	202	48	5,00	24,00	41		52	58	60	Dislutkan
1.9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	40	2	4	1,00	2,00	3		5	6	7	Dislutkan
1.10	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	0	35.214	35.073,68	3.507,37	17.536,84	29.812,63		35.385,52	35.697,36	36.009,20	Dislutkan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis sektor kelautan dan perikanan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi perikanan

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya. Upaya mengoptimalkan produksi dari segi perikanan budidaya berupa peningkatan ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang ada di Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat. Kemudian dari sektor perikanan tangkap, upaya peningkatan produksi hasil dan kualitas tangkapan nelayan dilakukan dengan peningkatan armada perikanan baik sarana maupun prasarana perikanan tangkap.

Faktor menghambat peningkatan optimalisasi produksi perikanan kualitas sumberdaya pembudidaya/nelayan sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi samping itu juga ketersediaan sarana dan prasarana seperti pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana budidaya ikan, dan pengolahan ikan.

2. Daya saing produk yang masih rendah

Beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diantaranya : (a) Isu ketahanan pangan, (b) Perubahan iklim dunia, (c) Peluang pemanfaatan inovasi Blue Economy, (d) Kualitas dan realibilitas data perikanan, (e), Minat mitra kerjasama untuk pembangunan hilirisasi perikanan, (f) Tantangan perdagangan perikanan global, (g) Sertifikasi dan standard yang ditetapkan oleh mitra, (h) Harga komoditas pangan dan non pangan, (i) Ancaman stunting Indonesia, (j) Mikroplastik (produk dan kemasan), dan (k) Perkembangan teknologi.

Di samping hal tersebut di atas, dari segi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro dan kecil di Kalimantan Tengah diantaranya: (1) pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil tentang standar mutu yang masih rendah, (2) penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, (3) belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, (4) permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar,

serta perizinan, (5) pembinaan usaha yang perlu ditingkatkan, (6) keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD).

3. Masih rendahnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;

Salah satu indikator tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah dalam ukuran PDRB perkapita yang menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata yang mungkin dicapai masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan peranan dan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB maupun PDRB perkapita terus dilakukan diantaranya melalui optimalisasi penggunaan SDA yang dimiliki. Penggunaan SDA harus diprioritaskan pada sektor antara lain komoditas yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Meningkatkan PDRB berkorelasi dengan peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan melalui melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah.

4. Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Pembangunan daerah tidak terlepas dari memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam dalam pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Semakin menurunnya ketersediaan sumber daya perikanan juga seringkali memicu konflik antar nelayan. Konflik nelayan ini timbul disinyalir karena beberapa hal misalnya, adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan, pelanggaran jalur penangkapan, penjarahan rumpon, penggunaan alat/bahan yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, minimnya hasil tangkapan di daerah tertentu (over exploited) dan menyebabkan nelayan mencari daerah tangkapan baru. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum serta pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Perikanan kepada nelayan/pelaku usaha di bidang perikanan.

Isu penting berkenaan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Disamping itu juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi perairan yang memiliki fungsi agar terjaga kelestarian sumberdaya ikan dan menunjang program pariwisata bahari.

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum;

Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDM, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, apalagi dengan cakupan wilayah perikanan tangkap yang sangat luas, tentu memerlukan kapasitas kelembagaan pengawasan perikanan yang kuat.

Kemudian, ditambah lagi dengan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian sumber daya ikan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk terjadi pelanggaran di laut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Kapasitas kelembagaan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap juga belum kuat, tegas, dan **independent** (mandiri), karena keputusannya seringkali masih dipengaruhi oleh oknum-oknum penguasa. Hal ini terjadi, karena Pemerintah belum memberikan dukungan penuh kepada lembaga penegakan hukum tersebut, sehingga oknum-oknum penguasa masih bisa dapat mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya.

6. Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan publik yang cepat dan tepat

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat menjadi isu yang tertuang di RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka diperlukan peningkatan kinerja pelayanan publik bidang kelautan dan Perikanan.

Melalui penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terkait dengan adanya Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang berhubungan dengan analisis kebutuhan ada beberapa hal yang turut mempengaruhi Rancangan Awal RKPD antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan

Dari telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tantangannya adalah:

- a) Meningkatnya produksi sektor kelautan dan perikanan;
- b) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penunjang UPTD Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat;
- f) Terwujudnya Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian;
- g) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses;
- h) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a) Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- b) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang budidaya (laut, payau dan tawar) masih cukup luas;
- c) Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk kelautan dan perikanan kondusif;
- d) Kebutuhan produk kelautan dan perikanan di masyarakat cukup tinggi;
- e) Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Secara detail, rincian penjelasan di atas pada komposisi penganggaran masing-masing program dan kegiatan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					36.063.465.780	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.693.635.780	
X	XX	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					750.000.000	
X	XX	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	185.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	63.700.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	101	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	101	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	101	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	18.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
X	XX	01	101	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	267.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	101	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	176.300.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.453.835.780	
X	XX	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	114	16.236.835.780	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	102	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	150.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	102	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	7.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	102	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			
X	XX	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	102	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
X	XX	01	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	40.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	102	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1		
X	XX	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					220.000.000	
X	XX	01	103	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	103	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	60.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	103	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	50.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	103	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	50.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	103	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
X	XX	01	103	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	104		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
X	XX	01	104	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			
X	XX	01	104	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen			
X	XX	01	104	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan			
X	XX	01	104	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen			
		01			(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)						
X	XX	01	104	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan			
					(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)						
X	XX	01	104	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
					(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)						
X	XX	01	104	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan			
X	XX	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					320.000.000	
X	XX	01	105	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	200.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	105	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	105	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			
X	XX	01	105	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	105	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang			
X	XX	01	105	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan			
X	XX	01	105	08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
X	XX	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	30.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	105	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			
X	XX	01	105	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	30.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah					537.400.000	
X	XX	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.800.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	60.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			
X	XX	01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	27.600.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
X	XX	01	106	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			
X	XX	01	106	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	200.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000	
X	XX	01	107	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	107	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	107	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	107	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	107	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	107	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	107	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	107	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	107	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
X	XX	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	107	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			
X	XX	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.929.400.000	
X	XX	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.700.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	852.500.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	27.200.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.043.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					423.000.000	
X	XX	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	150.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
X	XX	01	109	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit			
X	XX	01	109	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit			
X	XX	01	109	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	10.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	46.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	109	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	6		
X	XX	01	109	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			
X	XX	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	217.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
X	XX	01	109	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			
X	XX	01	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			
X	XX	01	109	012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					1.000.000.000	
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					400.000.000	
3	25	02	101	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	3	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	02	101	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	2,5	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	02	101	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2,5	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	02	101	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	8	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	02	102		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					200.000.000	
3	25	02	102	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	9	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	02	102	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	02	102	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	9	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	02	102	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	02	102	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Tercatatnya Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen			
3	25	02	103		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					400.000.000	
3	25	02	103	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	7	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	02	103	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	8	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	02	103	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	5	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	02	103	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	5	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					8.325.900.000	
3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					400.000.000	
3	25	03	101	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	2	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	101	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	3	200.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	101	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	3	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	102		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas					300.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
					Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
3	25	03	102	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	2	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	102	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	4	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	102	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	4	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	103		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						
3	25	03	103	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			
3	25	03	103	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	03	103	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
					GT						
3	25	03	104		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil						
3	25	03	104	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			
3	25	03	104	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	03	105		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100.000.000		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	03	105	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			
3	25	03	105	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	3	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					7.525.900.000	
3	25	03	106	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan			
3	25	03	106	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2	7.117.900.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	106	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	7	408.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	03	107		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	03	107	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			
3	25	03	107	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	03	108		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
3	25	03	108	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			
3	25	03	108	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	03	109		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						
3	25	03	109	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			
3	25	03	109	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	03	110		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
3	25	03	110	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			
3	25	03	110	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANBUDIDAYA					3.547.930.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	04	101		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
3	25	04	101	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	04	101	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25		101	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen			
3	25	04	102		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						
3	25	04	102	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	04	102	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	04	103		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						
3	25	04	103	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	04	103	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi			
3	25	04	104		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	04	104	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi			
3	25	04	104	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi			
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					3.547.930.000	
3	25	04	105	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			
3	25	04	105	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	4	500.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	04	105	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.925.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	04	105	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	4	20.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	04	105	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					902.930.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	04	105	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	2	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	04	105	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	8	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	04	105	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Ha			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	04	105	09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Orang			
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat						
3	25	04	106	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit			
3	25	04	106	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit			
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					896.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					896.000.000	
3	25	05	101	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	496.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	05	101	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	05	101	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	05	101	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	6	200.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
3	25	05	102	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	05	102	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen			
3	25	05	102	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen			
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					600.000.000	
3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					100.000.000	
3	25	06	101	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Rekomendasi			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	06	101	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi			
3	25	06	101	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	2	100.000.000	
3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					200.000.000	
3	25	06	102	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	6	100.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	06	102	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	6	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	06	103		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					300.000.000	
3	25	06	103	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	6	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA
3	25	06	103	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	7	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	PAGU USULAN 2023	HASIL REVIEW
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
3	25	06	103	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen	5	100.000.000	SESUAI DENGAN RENSTRA

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD Provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada RKPD Tahun Anggaran 2023 seperti pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Anggaran Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Pengadaan Kapal Perikanan 10 GT Lengkap dengan Alat Tangkap (KUB Kakap Pelapisan KUB Desa Sabuai Kec. Kumai dan KUB Harapan Baru Desa Tanjung Putri Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat) Volume 5 Unit	KUB Kakap Pelapisan KUB Desa Sabuai Kec. Kumai dan KUB Harapan Baru Desa Tanjung Putri Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Dilanjutkan pembahasan pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Pengadaan Alat Tangkap Gillnet 6" (KUB Usaha Mandiri, KUB Tangguh Samudera dan KUB Nantai Barat Desa Sungai Bakau Kabupaten Kotawaringin Barat) Volume 10 Unit	KUB Usaha Mandiri, KUB Tangguh Samudera dan KUB Nantai Barat Desa Sungai Bakau Kabupaten Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Dilanjutkan pembahasan pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Pengadaan Kapal Perikanan 5 GT lengkap dengan alat tangkap (KUB Usaha Kita dan KUB Mandiri Desa Tanjung Putri, KUB Bogam Timur dan KUB Bintang Tanjung Desa Teluk Bogam Kabupaten Kotawaringin Barat) Volume 3 Unit	KUB Usaha Kita dan KUB Mandiri Desa Tanjung Putri, KUB Bogam Timur dan KUB Bintang Tanjung Desa Teluk Bogam Kabupaten Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Dilanjutkan pembahasan pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Sertifikasi kapal nelayan (pass kecil) (Kel. Kumai Hilir, Desa Sei Kapitan, Desa Kubu, Sei. Bakau, dan Teluk Bogam Kecamatan Kumai, Desa Tanjung Putri Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat) Volume 100 Kapal	Kel. Kumai Hilir, Desa Sei Kapitan, Desa Kubu, Sei. Bakau, dan Teluk Bogam Kecamatan Kumai, Desa Tanjung Putri Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : lanjut bahas di forum Koefisien : 0 Kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan Fasilitas Nelayan dalam rangka penerbitan tanda daftar perikanan dilaksanakan dengan melibatkan para stakeholder Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok Volume 2 Unit	Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum tercantum kelompok penerima hibah, karena sebagai syarat penerima hibah adalah kelompok yg sudah berbadan hukum Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Pencetakan Kawasan Tambak di Desa Sabuai Kec. Kumai Volume 1 Paket	Desa Sabuai Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : akan dibahas pada forum Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Bukan kegiatan prioritas Koefisien : 1 0 Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Tersedianya Sarana Budidaya Laut berupa KJA di Tanjung Keluang Kubu Volume 1 Paket	Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Agar Dinas Kabupaten memverifikasi penerima bantuan, dilengkapi dengan analisis usaha dan manfaat dari pemberian bantuan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 111	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Pembuatan dan Rehabilitasi Jalan Produksi kawasan tambak udang di desa Sei Bakau Volume 3 KM	Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Bukan prioritas program Koefisien : 1 Paket Anggaran : 111	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil Poklachsar PAHARI (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pengolahan) dengan Komoditas Kerupuk Ikan Volume 1 Paket	Kelurahan Mendawai Seberang Kec. Arsel, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten/kota Koefisien : 1 Paket Anggaran : 111	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Pengadaan Cold box Volume 100 Buah	Kec. Arsel, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan kab/kota Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Pengadaan Chees Freezer Volume 50 Buah	Kec. Arsel dan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten/kota, namun dalam hal pembinaan dapat berkerjasama dengan provinsi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Barito Timur	Pengadaan Alat Tangkap Tradisional	Juru Banu, Putut Tawuluh,, Kab. Barito Timur	Rekomendasi : dilanjutkan pembahasan pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Barito Timur	Keramba Benih dan Pakan	Kupang Baru, Dam Karau,, Kab. Barito Timur	Rekomendasi : dilanjutkan pembahasan pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Barito Timur	Benih Ikan untuk di Restocking	Dam Karau, Dusun Tengah Dam Tampa, Paku Sungai Sirau, Dam Turan Amis,, Kab. Barito Timur	Rekomendasi : dilanjutkan pembahasan pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Barito Timur	Mengusulkan Adanya Pemberian Bibit Ikan untuk di Budidayakan di Sungai	Magantis,, Kab. Barito Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Kabupaten Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar Dinas Kabupaten dapat berkoordinasi dengan BPBAT Mandiangin Koefisien : 1 Kabupaten Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Lamandau	Desa Mekar Mulya mengajukan pengadaan keramba untuk disiapkan di sungai Saharaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi sungai sarana untuk dapat dijadikan tempat budidaya ikan.	Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya, Kab. Lamandau	Rekomendasi : dilanjutkan pembahasan pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kapuas	Bantuan pembuatan Kolam Ikan 4 UNIT	Kelompok tani CINTA BERSATU di Kab. Kapuas, Kab. Kapuas	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kapuas	Bantuan Budidaya Ikan 2 POKTAN	Kelompok Budidaya ikan di Kab. Kapuas, Kab. Kapuas	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten dan dalam rangka pembinaan dan penerbitan ijin lintas kabupaten dapat berkoordinasi dengan provinsi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Katingan	diperlukan Pengadaan Bibit Pakan Ikan-10.000kg- Rp.200.000.000	Keluarahan Kasongan Lama, Kab. Katingan	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar Dinas Kabupaten dapat berkoordinasi dengan BPBAT Mandiangin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Katingan	Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana/ banyaknya kolam yang bocor di Balai Benih Ikan (BBI). Rehab kolam Balai Benih Ikan dengan plastik HDPE. 1.300 m2 - Rp. 195.000.000	BBI Hampalit, Kab. Katingan	Rekomendasi : Dilanjutkan Pembahasan di forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dianggarkan melalui dana DAK Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Katingan	Bantuan Pengadaan Kapal Perikanan 3 GT Penangkapan Ikan Beserta Alat Tangkap - 1 paket - Rp. 700.000.000	pegatan dan galinggang, Kab. Katingan	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar diusulkan melalui dana DAK Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Katingan	bantuan Pengadaan alat tangkap untuk perairan umum daratan (Pengilar) - 1 paket - Rp. 300.000.000	Perigi Tumbang Bulan Gelinggang, Kab. Katingan	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan pengadaan sarana penunjang usaha budidaya ikan masyarakat berupa benih Papuyu sebanyak 100.000 ekor, Patin sebanyak 100.000 ekor dan Lele sebanyak 200.000 ekor dan Pakan Ikan sebanyak 20 Ton dengan pagu dana sebesar Rp. 520.000.000	Desa Mantaren I (Kec. Kahayan Hilir), Desa Mantaren II (Kec. Kahayan Hilir), Desa Tahai Jaya (Kec. Maliku) dan Desa Tahai Baru (Kec. Maliku), Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan pengadaan sarana penunjang usaha budidaya ikan masyarakat berupa Pengadaan Mesin Sedot Lumpur dan kelengkapannya sebanyak 10 Unit dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000	Desa Mantaren II (Kec. Kahayan Hilir), Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan pembangunan prasarana budidaya ikan untuk menunjang usaha budidaya ikan masyarakat berupa Pembuatan Kolam Terpal sebanyak 40 unit dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,-	Desa Hanjak Maju (Kec. Kahayan Hilir), Desa Gandang (Kec. Maliku), Desa Kantan Muara (Kec. Pandih Batu) dan Desa Talio (Kec. Pandih Batu), Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan 10 Unit Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran < 5 GT di Kecamatan Sebangau Kuala. Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,-	Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan 10 Unit Mesin Kapal Penangkap Ikan berukuran <5 GT di Kecamatan Kahayan Kuala. Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 120.000.000,-	Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kelompok yang sudah berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang disertai dengan analisis biaya dan usaha. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan 10 Pcs Alat Tangkap Ramah Lingkungan Untuk Perairan Umum Daratan di Kecamatan Kahayan Tengah Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,-	Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan 10 Unit Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran < 3 GT Untuk Perairan Umum Daratan di Kecamatan Jabiren Raya Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 180.000.000,-	Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Darat Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan dan Sarana Keselamatan Pelayaran (4 Paket)	Kecamatan Mentaya Hulu, Desa Tanjung Jariangau, KUB Jukung Sodor, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten Koefisien : 1 paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece)	Kecamatan Baamang, Kelurahan Tanah Mas, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece).	Kecamatan Kota Besi, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece)..	Kecamatan Kota Besi, Kelurahan Kota Besi Hillir, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece),	Kecamatan Parenggean, Desa Manjalin, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 0 Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece)..	Kecamatan Parenggean, Desa Barunang Miri, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece);	Kecamatan Parenggean, Desa Kabuau, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece) "	Kecamatan Mentaya Hulu, Desa Tanjung Bantur, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece)-	Kecamatan Mentaya Hulu, Desa Pemantang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece)""	Kecamatan Mentaya Hulu, Desa Kawan Batu, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (50 Piece),,	Kecamatan Mentaya Hulu, Desa Tangar, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan dan Sarana Keselamatan Pelayaran (1 Paket)	Kecamatan Pulau Hanaut, Desa Satiruk, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan dan Sarana Keselamatan Pelayaran (4 Paket)	Kecamatan Teluk Sampit, Desa Regei Lestari, KUB Harun Belum, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan dan Sarana Keselamatan Pelayaran (4 Paket);	Kecamatan Pulau Hanaut, Desa Hanaut, KUB Berkat Bersatu, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Mesin Kapal Perikanan untuk Perahu/Kapal Penangkap Ikan Periran Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT (10 Paket)	Kecamatan Pulau Hanaut, Desa Bapinang Hilir Laut, KUB Nur Abadi, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu melakukan inventarisasi permasalahan dan kebutuhan kelompok serta kemampuan kelompok untuk mengelola bantuan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Nelayan Perairan Laut (500 Paket)	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Desa Sei Ijum Raya, Koperasi Mitra Nelayan Sijura, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kelompok yang sudah berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang disertai dengan analisis biaya dan usaha Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) (1 Unit)	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Desa Sei Ijum Raya, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 1/PER-DJPT/2018 tentang Juklak pembangunan SPDN Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Kampung Perikanan Budidaya Ikan Jelawat (1 Paket)	Desa Kandan, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : akan dibahas pada forum selanjutnya Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kampung Perikanan Budidaya Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Percontohan budidaya patin kolam terpal (1 Paket),	Desa Cempaka Mulia Barat, Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Dilanjutkan dibahas di forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pengembangan budidaya tambak bantuan bibit udang dan bandeng Pokdakan Karya Mufakat II (1 Paket)	Desa Satiruk Kec. Pulau Hanaut, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kelompok yang sudah berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang disertai dengan analisis biaya dan usaha. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembuatan pintu air tambak Pokdakan Karya Mufakat II (1 Paket)	Desa Satiruk Kec. Pulau Hanaut, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kelompok yang sudah berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang disertai dengan analisis biaya dan usaha Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembuatan akses jalan produksi tambak utk 3 yaitu pokdakan Pokdakan Lempuyang Makmur, Lempuyang Jaya, dan Lempuyang Membangun (1 Paket)	Desa Lempuyang Kec. Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kelompok yang sudah berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang disertai dengan analisis biaya dan usaha Koefisien : 1 paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Mesin cetak pakan skala besar (1 Paket)	Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (100 Roll)	Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Hulu, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Berkat Bersama)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Nelayan Laut Berkah)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Harapan Sejahtera)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Sinar Nelayan)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Sepakat Nelayan)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Undang Merah)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Serumpun)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Bina Karya)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Karya Mandiri)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Sumber Harapan)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Mina Lestari)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Usaha Baru)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Karya Bersama)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Berkah Sinar Fajar)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Bintang Laut)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Buih Seruyan)	Desa Pematang Panjang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Fajar Indah)	Desa Pematang Panjang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Anugerah Laut)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Rajungan)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Kelompok Nelayan Karang Laut)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air payau (Kelompok Pembudidaya Ikan Tiger Bersatu)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air payau (Kelompok Pembudidaya Ikan Windu Barokah)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air payau (Kelompok Pembudidaya Ikan Windu Mulia)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Kapuas	Mesin Pembuat Pakan Ikan 10 unit	Basarang, Kab. Kapuas	Rekomendasi : untuk dibahas selanjutnya pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Kapuas	Pengadaan pakan ikan apaung 1 Paket	basarang, Kab. Kapuas	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kota Palangkaraya	Kurangnya rumah produksi olahan hasil perikanan	Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kota Palangkaraya	Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha yang di miliki oleh nelayan kecil (Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil)	Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kota Palangkaraya	Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam mengelola dan mengembangkan usaha nelayan kecil (Bimbingan teknis pengembangan KUB / Koperasi Nelayan Kecil)	Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Agar Dinas Perikanan Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Penyuluh perikanan diwilayah kerjanya masing-masing. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kota Palangkaraya	Terbatasnya Sarana Prasarana Pengawasan serta pengetahuan dan keterampilan petugas pengawasan dan POKMASWAS	Kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu melakukan inventarisasi permasalahan dan kebutuhan kelompok dan kemampuan kelompok untuk mengelola bantuan. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kota Palangkaraya	Tidak adanya sarana prasarana Pusat Produksi Ikan Hias	Kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : selanjutnya akan dibahas pada forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Barito Utara	Bantuan Balai, Pakan, Bibit	Barito Utara, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Dilanjutkan dan dibahas di forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiangin dan Penyuluh Perikanan serta untuk modalnya dapat melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 25 HP untuk Kelompok Nelayan Berkat Bersama 10 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 25 HP untuk Kelompok Nelayan Laut Berkah 10 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : lanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 25 HP untuk Kelompok Nelayan Harapan Sejahtera 10 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan bahas di forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 30 HP untuk Kelompok Nelayan Sinar Nelayan 10 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : lanjutkan bahas di forum Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 30 HP untuk Kelompok Nelayan Sepakat Nelayan 11 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 30 HP untuk Kelompok Nelayan Undang Merah 10 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 26 HP untuk Kelompok Nelayan Berkah Siamuk 20 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 27 HP untuk Kelompok Nelayan Serumpun 14 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 24 HP untuk Kelompok Nelayan Bina Karya 15 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin 27 HP untuk Kelompok Nelayan Karya Mandiri 10 Unit)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin 30 HP untuk Kelompok Nelayan Sumber Harapan 11 Unit)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 28 HP untuk Kelompok Nelayan Mina Lestari 10 Unit)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin tianli 28 HP untuk Kelompok Nelayan Usaha Baru 16 Unit)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan Perahu / kapal penangkap ikan lengkap Panjang 12 m Kelompok Nelayan Karya Bersama 15 Unit)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan alat tangkap gill net 2 inc untuk Kelompok Nelayan Berkah Sinar Fajar 100 Piece)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan alat tangkap gill net 2 inc untuk Kelompok Nelayan Bintang Laut 100 Piece)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 30 HP untuk Kelompok Nelayan Buih Seruyan 10 Unit)	Desa Pematang Panjang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 30 HP untuk Kelompok Nelayan Fajar Indah 10 Unit)	Desa Pematang Panjang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin tianli 28 HP untuk Kelompok Nelayan Anugerah Laut 11 Unit)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan Alat Tangkap Kepiting Rajungan untuk Kelompok Nelayan Rajungan 1 Paket)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin tianli 28 HP untuk Kelompok Nelayan Karang Laut 20 Unit)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air payau (Penyediaan mesin sedot lengkap untuk Kelompok Pembudidaya Ikan Tiger Bersatu 14 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air payau (Penyediaan mesin sedot lengkap untuk Kelompok Pembudidaya Ikan Windu Barokah 10 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air payau (Penyediaan mesin sedot lengkap untuk Kelompok Pembudidaya Ikan Windu Mulia 15 Unit)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kelompok yang sudah berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang disertai dengan analisis biaya dan usaha Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan alat tangkap trammel net 2,5 inc untuk Kelompok Nelayan Buih Pasir 130 Piece)	Desa Persil Raya, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 28 HP untuk Kelompok Nelayan Jalan Ais Nasution RT.11 RW.03, Kab. Seruyan 12 Unit)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin amec 26 HP untuk Kelompok Nelayan Putra Selayar 10 Unit)	Kel. Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan alat tangkap gill net 4 inc untuk Kelompok Nelayan Kuda Laut Biru 100 Piece)	Desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan dengan melengkapi data Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan mesin tianli 27 HP untuk Kelompok Nelayan Kuda Laut 10 Unit)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan dan fasilitasi menerbitkan ijin Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk perairan laut karena sesuai UUD No 23 Tahun 2014 sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan laut (Penyediaan alat tangkap gill net millenium 4 inc untuk Kelompok Nelayan Laut Cemara Indah 50 Piece)	Desa Sungai Bakau, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Lebih diprioritaskan bagi kelompok yang mampu dan bertanggungjawab dalam pengelolaan hibah serta memiliki manajemen yang sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air tawar (Penyediaan mesin pembuat pakan ikan 1 Unit)	Desa Banua Usang, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan dengan melengkapi data dukung Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, agar dapat berkoordinasi dengan LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air tawar (Penyediaan Kolam Ikan Bioflok dan Perlengkapannya 10 Unit)	Desa Sembuluh II, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan dengan melengkapi data Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiangin dan Penyuluh Perikanan serta untuk modalnya dapat melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Seruyan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kurangnya APBD Kabupaten untuk memberikan bantuan sarana prasarana perikanan budidaya untuk pembudidaya air tawar (Penyediaan mesin pembuat pakan ikan 1 Unit)	Desa Bahaur, Kab. Seruyan	Rekomendasi : dilanjutkan dengan melengkapi data dukung Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Lebih diprioritaskan bagi kelompok yang mampu dan bertanggungjawab dalam pengelolaan hibah serta memiliki manajemen yang sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kota Palangkaraya	Kurangnya SDM pembenihan ikan gurami dan ikan baung dengan sarana dan prasarana UPR (Unit Pembenihan Rakyat)	Kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : dilanjutkan dengan melengkapi data dukung Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiangin dan Penyuluh Perikanan serta untuk modalnya dapat melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kota Palangkaraya	Untuk mendukung kawasan perikanan budidaya ikan baung diperlukan KJA (Keramba Jaring Apung)	Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kelompok yang sudah berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang disertai dengan analisis biaya dan usaha serta adanya jaminan termanfaatkan dengan baik Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Lamandau	Untuk mendukung produksi budidaya ikan diperlukan pengadaan dan pelatihan Mesin Pengolah Pakan Mandiri untuk Pokdakan	Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiangin dan Penyuluh Perikanan serta untuk modalnya dapat melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Bimbingan standar usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala sedang dan besar Rp100.000.000	Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : dilanjutkan dengan melengkapi data dukung Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Prasarana Pengolahan dapat dianggarkan melalui DAK Kabupaten, dan Pembinaannya dapat melibatkan PKK atau Pihak Kegiatan dalam upaya peningkatan SDM Pengolah Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Lamandau	Pengadaan dan pelatihan Mesin Pengolah Pakan Mandiri untuk Pokdakan untuk mendukung produksi budidaya ikan diperlukan	Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disesuaikan dengan skala prioritas dan lebih diarahkan untuk dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiingin dan Penyuluh Perikanan serta untuk modalnya dapat melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Gunung Mas	Belum ada komoditas unggulan perikanan di Kecamatan Tewah dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan Kabupaten Gunung Mas: Usulan Bantuan Karamba Jaring Apung 13 Unit, Bibit Ikan Patin 13.000 Ekor dan Pakan 416 zak untuk kelompok Kahanjak dengann Link Dokumen Pendukung (Proposal) : https://bit.ly/ProposalUsulanKelompokTani	Jl. Lintas Tewah Rungan RT. 01, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan ditampung, agar Dinas Kabupaten dapat diupayakan melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR serta dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiingin dan Penyuluh Perikanan untuk pembinaan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Sukamara	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya untuk Pokdakan Maju Jaya Bersama di Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci (kolam bundar, bibit nila dan pakan)	Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan ditampung, agar Dinas Kabupaten dapat diupayakan melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR serta dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiingin dan Penyuluh Perikanan untuk pembinaan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Sukamara	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya untuk Pokdakan Rezeki Agung Jaya di Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci (bibit udang galah, bibit ikan gurami dan pakan) (1 Paket)	Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan ditampung, agar Dinas Kabupaten dapat diupayakan melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR serta dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiingin dan Penyuluh Perikanan untuk pembinaan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Pengusul	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
BAPPEDA Kab. Sukamara	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya untuk Pokdakan Rezeki Lancar di Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci (bibit ikan nila dan pakan) 1 Paket	Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan ditampung, agar Dinas Kabupaten dapat diupayakan melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR serta dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiangin dan Penyuluh Perikanan untuk pembinaan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Sukamara	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya untuk Pokdakan Sejahtera di Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci (kolam bundar, bibit ikan lele dan pakan) 1 paket	Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan ditampung, agar Dinas Kabupaten dapat diupayakan melalui LPMUKP dan fasilitasi KUR serta dikoordinasikan dengan BPBAT Mandiangin dan Penyuluh Perikanan untuk pembinaan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Sukamara	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya untuk Koperasi Damar Melati Jaya di Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci (Excavator) 1 unit	Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat disinkronkan dengan provinsi berupa kegiatan pembinaan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Badan Jalan Pertambakan Desa Sungai Pasir RT. 005 Kecamatan Pantai Lunci 1 paket	Desa Sungai Pasir Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kewenangan Kabupaten, dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Sukamara	Pabrik Es Kapasitas 20 Ton 1 paket	Kab Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Pabrik Es Tahun 2022 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
BAPPEDA Kab. Sukamara	Cold Storage Kapasitas 50 Ton 1 paket	Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : dilanjutkan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Pabrik Es Tahun 2022 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, bertolak dari arahan Presiden RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. Memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

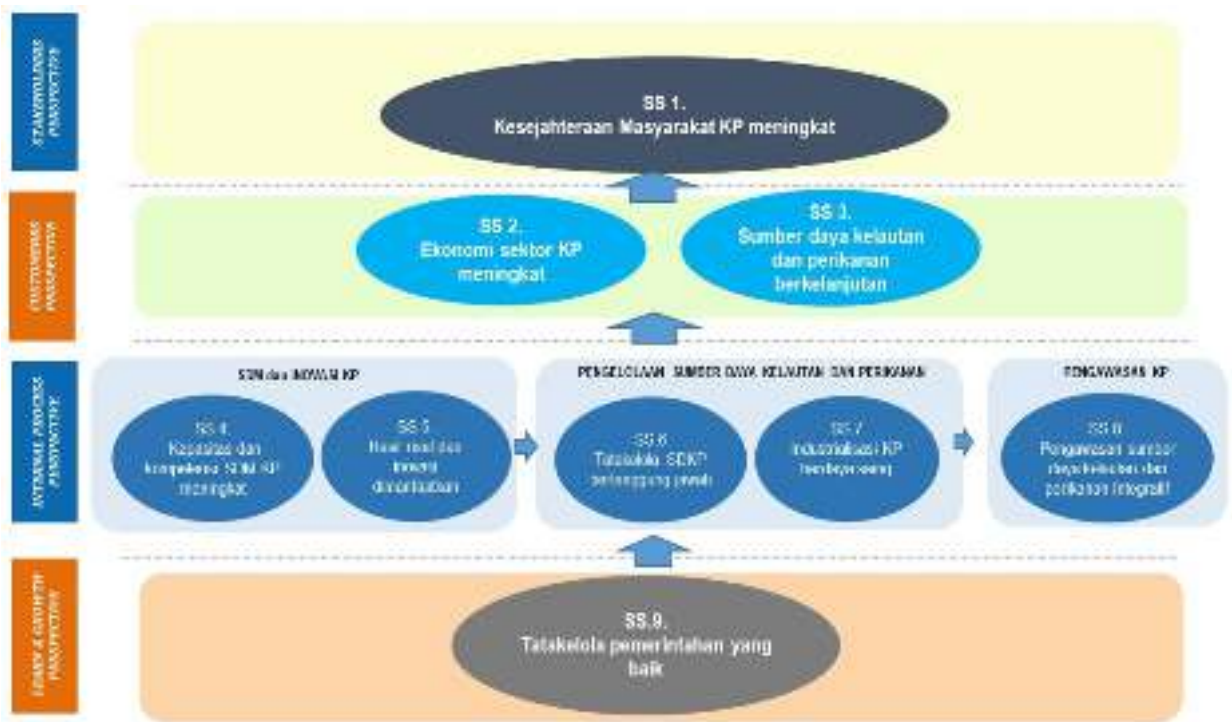
Dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 dan secara khusus arahan Presiden tersebut maka Visi KKP tahun 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka penjabaran dari misi pembangunan kelautan dan perikanan nasional (misi Presiden dan Wakil Presiden), maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- d. meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024 menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:



Sasaran Strategis (SS) tersebut diimplementasikan pada kondisi terukur yang dapat dicapai secara nyata guna mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) sebagaimana program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	59,16	60,31	61,47	62,60	63,87
	a. Nilai Tukar Nelayan	102,00	103,00	105,00	106,00	107,00
	b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
	c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75
	d. Nilai Tukar Pelambak Garam	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat						
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,90	8,11	8,31	8,51	8,71
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,30	58,08	59,530	61,02	62,05
SS 3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan						
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	≤64%	≤67%	≤72%	≤76%	≤80%
6	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat						
7	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75
SS 5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan						
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab						
9	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	7	9	11
10	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)
11	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
SS 7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing						
12	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75
	a. Perikanan Tangkap	8,02	8,42	8,88	9,43	10,10
	b. Perikanan Budidaya	18,44	19,47	20,54	21,58	22,65
	- Ikan	7,45	7,92	8,69	9,48	10,32
	- Rumpul Laut	10,99	11,55	11,85	12,10	12,33
13	Produksi garam (juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan integrative						
14	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75
15	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola Pemerintahan yang baik						
16	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (%)	88	89	89	90	90

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;

4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP. Peningkatan penerimaan PNBP pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi **“Kalimantan Tengah Makin Berkah”** serta Misi **“Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis”**. Maka arah Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur dan semangat membangun kelautan dan perikanan menjadi lebih baik demi sejahteraan masyarakat Kalimantan tengah. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang Produktif, Berdaya Saing, Inovatif, Kolaboratif dan Berorientasi pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta pengelolaan berkelanjutan”

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan dengan tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai induk organisasinya. Di dalam pernyataan visi tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan dengan rinci pencapaian organisasi Kelautan dan Perikanan di masa depan, yaitu ;

- 1) **Produktif dan Berdaya Saing**, yakni meningkatkan produktifitas usaha di sektor kelautan dan perikanan dalam upaya peningkatan kontribusi PDRB melalui menghasilkan produk-produk yang berdaya saing baik secara mikro maupun secara makro.
- 2) **Inovatif dan Kolaboratif**, merupakan kunci dari perbaikan pelayanan publik disamping menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan tetap kelestarian, Dinas juga melakukan terobosan-terobosan berupa

menggendeng semua pihak untuk berinovasi merubah tantangan menjadi peluang dan kesempatan dalam mewujudkan produk baru yang berkualitas, lebih efektif dan efisien, serta bernilai tambah.

3) Berorientasi pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan, yang artinya ekonomi yang mandiri, terbuka, dan berkelanjutan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mana:

- Mandiri karena kegiatan ekonomi dilakukan dengan mempergunakan sumber daya local yang ada dan ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal.
- Terbuka karena harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berusaha dan mengakses sumber daya yang tersedia.
- Berkelanjutan berarti kegiatan ekonomi dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan masa depan dan masyarakat yang lebih luas.

Penetapan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan atas komitmen bersama tentang gambaran masa depan yang akan diwujudkan. Untuk menunjang terwujudnya Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2021-2026, sehingga Visi ditetapkan menjadi milik bersama dan diyakini mencakup keseluruhan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai organisasi.

Adapun Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi, dengan tujuan:

- Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan

2. Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:

- Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, dengan tujuan:

- Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 1: Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi										
1	Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	116.348,52	119.867,05	128.008,34	136.140,63	144.272,92	152.405,21	160.537,50
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	131.311,20	130.526,10	133.136,62	137.130,72	141.244,64	145.481,98	149.846,44
		Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)	63.620	67.630	69.820	72.010	74.200	76.390	78.580
2	Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.	Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	33.038,30	34.450,00	34.761,84	35.073,68	35.385,52	35.697,36	36.009,20
		Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,12	49,63	55,81	57,62	59,43	61,23	63,04
3	Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	2,96	3,10	0,10	0,40	0,70	1,00	1,30
		Meningkatnya Pendapatan	Nilai Tukar Nelayan	106,26	107,00	108,25	109,50	110,75	112,00	113,25

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nelayan	(NTN/NTBi)							
Misi 2 : Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan										
1	Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	-	-	2	4	5	6	7
2	Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	85	85	85	85	90	90
		Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok)	40	40	45	48	52	58	60
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi										
1.	Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat	Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID	27	29	31	33	35	37	40

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari “Makin BERKAH” yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih pasangan Gubernur **H. Sugianto Sabran** dan Wakil Gubernur **H. Edy Pratowo, S.sos., MM.** Kalimantan Tengah Periode 2021-2026 sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Keenam cita-cita “**Makin BERKAH**” menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah:

• Berkah #1: Kalteng Bermartabat

Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang

- Program Icon** :
- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
 - b) Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit *Belom Bahadat* (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan bereputasi cemerlang.

• Berkah #2: Kalteng Elok

Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah

- Program Icon** :
- a) Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau.
 - b) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.

• Berkah #3: Kalteng Bermartabat

Masyarakat berkarakter Religius

- Program Icon** :
- a) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat.
 - b) Memperluas pengiriman tokoh tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu dan hindu Kaharingan ke India.
 - c) Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.

• **Berkah #4: Kalteng Kuat**

Produktif, Sehat dan Cerdas

- Program Icon** :
- a) Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local.
 - b) Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana.
 - c) Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM.
 - d) Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan.
 - e) Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.

• **Berkah #5: Kalteng Amanah.**

Jujur, Profesional, Kreatif, dan Inovatif

- Program Icon :**
- a) Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.
 - b) Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya.
 - c) Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;
 - d) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus
 - e) Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas

• **Berkah #6: Kalteng Harmoni.**

Masyarakat Toleran, Beretika, Rukun

- Program Icon :**
- a) Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat.
 - b) Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib.
 - c) Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal

4.2. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

VISI : Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang Produktif, Berdaya Saing, Inovatif, Kolaboratif dan Berorientasi pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta pengelolaan yang berkelanjutan			
MISI 1 : Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, dan laut - Pembinaan kelembagaan pelaku usaha - pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi dan instalasi - Pembinaan kelompok pembudidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan - Fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi lahan pembudidayaan ikan - Food Estate - pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan, seperti: Kluster Tambak Udang Vaname (<i>Shrimp Estate</i>) - Penerapan teknologi adaptif dan efisien, seperti: Bioflok - Pengembangan pakan ikan mandiri yang murah dan berkualitas menggunakan bahan baku lokal - Pengembangan komoditas unggulan (ikan lokal) untuk ketahanan pangan - Mendorong kelompok pembudidaya ikan untuk berbadan hukum - Sertifikasi CBIB pembudidayaan ikan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap - Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait - Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan

		<p>operasionalisasi pelabuhan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan optimalnya - Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 	<p>berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan - Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan - Penguatan UPT perikanan tangkap
	Meningkatnya Kebutuhan Benih	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan) - Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi sarana produksi induk dan benih - Penguatan unit produksi di UPT - Peningkatan kualitas induk ikan - Sertifikasi CPIB pembudidayaan ikan
Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan	Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan - Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju <i>zero waste</i> - Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi kemitraan usaha - Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan - Fasilitasi akses pembiayaan - Penguatan pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan - Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan dan pengolahan - Pembinaan mutu pada UPI

		pengolahan	
	Meningkatnya Konsumsi Ikan	- Promosi peningkatan konsumsi ikan	- Safari Gemarikan - Pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan) - Lomba masak berbahan baku ikan - Iklan layanan masyarakat dan pameran produk perikanan
Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap - Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Budidaya - Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Pengolahan Pemasaran Perikanan	- Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah - Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) - Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan
	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	- Manajemen usaha penangkapan ikan melalui pendekatan <i>supply</i> (Sumber Daya Ikan) dan <i>demand</i> (Hasil Penangkapan Ikan)	- Pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan - Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital

MISI 2 : Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan manajemen dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (mangrove), dan terumbu karang - Penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran Dinas dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah provinsi, termasuk adanya pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang oleh menteri - Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut antara pemangku kepentingan berupa sosialisasi, pendampingan, identifikasi pemanfaatan eksisting, dan koordinasi - Fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi - Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi - Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir -
	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor - Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS - Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan Penguatan Organisasi - Penataan tata laksana - Penataan sistem manajemen SDM aparatur - Penguatan akuntabilitas kinerja

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2024, dilaksanakan melalui program-program pembangunan, dimana program tersebut secara teknis sejalan dengan program kementerian Kelautan dan Perikanan, serta program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	1	101		PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
X	XX	1	101	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	XX	1	101	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X	XX	1	101	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	XX	1	101	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	1	101	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	102		ADMINISTRASI KEUANGAN
X	XX	1	102	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	1	102	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	1	102	3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
X	XX	1	102	4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
X	XX	1	102	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	1	102	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	1	102	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X	XX	1	102	8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	1	102	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X	XX	1	103		ADMINISTRASI UMUM
X	XX	1	103	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	1	103	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	1	103	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	1	103	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
X	XX	1	103	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	XX	1	103	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	103	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
X	XX	1	103	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	XX	1	103	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
X	XX	1	103	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	XX	1	103	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	1	103	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	1	103	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	1	103	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	1	103	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	1	103	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	1	103	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	XX	1	103	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	XX	1	103	20	Pengadaan Mobil Jabatan
X	XX	1	103	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	103	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	103	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	1	103	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	103	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X	XX	1	103	26	Pengadaan Mebeleur
X	XX	1	103	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X	XX	1	103	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
X	XX	1	103	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X	XX	1	103	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X	XX	1	103	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	103	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	103	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	1	103	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	103	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	XX	1	103	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
X	XX	1	103	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X	XX	1	103	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X	XX	1	103	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	XX	1	103	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X	XX	1	103	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	104		PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
X	XX	1	104	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	1	104	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	XX	1	104	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X	XX	1	104	4	Pengadaan Pakaian Korpri
X	XX	1	104	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X	XX	1	104	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	1	104	7	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	1	104	8	Pemindahan Tugas PNS

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	1	104	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal
X	XX	1	104	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	1	104	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3	25	02	1,01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1,01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3	25	02	1,01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1,01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1,02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1,02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1,02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
3	25	02	1,02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
3	25	02	1,02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
3	25	02	1,03		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3	25	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1,03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	02	1,03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1,03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	03	1,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	03	1,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1,02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1,02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1,02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1,02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1,03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1,03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1,03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1,04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1,04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1,04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1,05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1,05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1,05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1,06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
3	25	03	1,06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1,06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1,06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1,07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
3	25	03	1,08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1,08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1,09		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1,10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1,10	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	03	1,10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	04	1,01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1,01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1,01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1,01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1,02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1,02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1,02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	04	1,03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1,03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT
3	25	04	1,03	02	Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	04	1,04		Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1,04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1,04	02	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1,05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1,05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1,05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1,05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1,05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1,05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1,05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	04	1,05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1,05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1,01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1,01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1,01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1,01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1,02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	05	1,02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
3	25	05	1,02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
3	25	05	1,02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	06	1,01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	06	1,01	01	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1,01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
3	25	06	1,01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1,02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
3	25	06	1,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1,03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1,03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1,03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						128.343.474.800				256.686.949.600
X.XX.1..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP				B	25.587.428.182			B	51.174.856.364
....		Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID				33				35	
X.XX.1.101.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	7	1.530.716.030		Dokumen	7	3.061.432.060
X.XX.1.101.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	565.716.030		Dokumen	1	1.131.432.060
X.XX.1.101.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	63.700.000		Dokumen	1	127.400.000
X.XX.1.101.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	20.000.000		Dokumen	1	40.000.000
X.XX.1.101.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	20.000.000		Dokumen	1	40.000.000
X.XX.1.101.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	18.000.000		Dokumen	1	36.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
X.XX.1.101.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	317.000.000		Laporan	1	634.000.000
X.XX.1.101.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	526.300.000		Laporan	1	1.052.600.000
X.XX.1.102.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tahun Layanan	1	14.617.526.816		Tahun Layanan	1	29.235.053.632
X.XX.1.102.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(KALIMANTAN TENGAH)	Orang/ Bulan	114	13.621.886.816		Orang/ Bulan	114	27.243.773.632
X.XX.1.102.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	905.400.000		Dokumen	1	1.810.800.000
X.XX.1.102.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	30.240.000		Dokumen	1	60.480.000
X.XX.1.102.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	20.000.000		Laporan	1	40.000.000
X.XX.1.102.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	40.000.000		Laporan	1	80.000.000
X.XX.1.103.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tahun Layanan	1	292.500.000		Tahun Layanan	1	585.000.000
X.XX.1.103.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	20.000.000		Dokumen	1	40.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
X.XX.1.103.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	60.000.000		Dokumen	1	120.000.000
X.XX.1.103.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	28.000.000		Laporan	1	56.000.000
X.XX.1.103.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	144.500.000		Laporan	1	289.000.000
X.XX.1.103.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	20.000.000		Laporan	1	40.000.000
X.XX.1.103.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	10.000.000		Laporan	1	20.000.000
X.XX.1.103.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	10.000.000		Dokumen	1	20.000.000
X.XX.1.105.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tahun Layanan	1	434.075.000		Tahun Layanan	1	868.150.000
X.XX.1.105.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	3	80.000.000		Unit	3	160.000.000
X.XX.1.105.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	143.000.000		Paket	1	286.000.000
X.XX.1.105.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	37.075.000		Dokumen	1	74.150.000
X.XX.1.105.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	72.000.000		Dokumen	1	144.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
X.XX.1.105.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(KALIMANTAN TENGAH)	Orang	3	72.000.000		Orang	3	144.000.000
X.XX.1.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(KALIMANTAN TENGAH)	Orang	3	30.000.000		Orang	3	60.000.000
X.XX.1.106.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tahun Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tahun Layanan	1	537.400.000		Tahun Layanan	1	1.074.800.000
X.XX.1.106.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	27.800.000		Paket	1	55.600.000
X.XX.1.106.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	10.000.000		Paket	1	20.000.000
X.XX.1.106.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	50.000.000		Paket	1	100.000.000
X.XX.1.106.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	50.000.000		Paket	1	100.000.000
X.XX.1.106.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	12.000.000		Paket	1	24.000.000
X.XX.1.106.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	60.000.000		Dokumen	1	120.000.000
X.XX.1.106.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	27.600.000		Laporan	1	55.200.000
X.XX.1.106.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	100.000.000		Laporan	1	200.000.000
X.XX.1.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	1	200.000.000		Dokumen	1	400.000.000
X.XX.1.107.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Paket	2	247.500.000		Paket	2	495.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
X.XX.1.107.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	7.500.000		Paket	1	15.000.000
X.XX.1.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	1	240.000.000		Unit	1	480.000.000
X.XX.1.108.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Paket	4	2.929.400.000		Paket	4	5.858.800.000
X.XX.1.108.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	6.700.000		Laporan	1	13.400.000
X.XX.1.108.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	852.500.000		Laporan	1	1.705.000.000
X.XX.1.108.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	27.200.000		Laporan	1	54.400.000
X.XX.1.108.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(KALIMANTAN TENGAH)	Laporan	1	2.043.000.000		Laporan	1	4.086.000.000
X.XX.1.109.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Paket	4	4.998.310.336		Paket	4	9.996.620.672
X.XX.1.109.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	2	1.961.000.000		Unit	2	3.922.000.000
X.XX.1.109.5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	4	19.985.336		Unit	4	39.970.672
X.XX.1.109.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	5	17.325.000		Unit	5	34.650.000
X.XX.1.109.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	2	3.000.000.000		Unit	2	6.000.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.2..	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)			Lokasi	4	3.377.209.023		Lokasi	4	6.754.418.046
3.25.2.101.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya Dokumen Program Strategis Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Dokumen Program Strategis Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Dokumen	4	930.000.000		Dokumen	4	1.860.000.000
3.25.2.101.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	3	130.000.000		Dokumen	3	260.000.000
3.25.2.101.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	(KALIMANTAN TENGAH)	Ha	2,5	600.000.000		Ha	2,5	1.200.000.000
3.25.2.101.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	(KALIMANTAN TENGAH)	Ha	2,5	100.000.000		Ha	2,5	200.000.000
3.25.2.101.4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	(KALIMANTAN TENGAH)	Orang	8	100.000.000		Orang	8	200.000.000
3.25.2.102.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan yang mendukung Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Kegiatan	2	320.000.000		Kegiatan	2	640.000.000
3.25.2.102.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	(KALIMANTAN TENGAH)	Rekomendasi	9	200.000.000		Rekomendasi	9	400.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.2.102.3	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	(KALIMANTAN TENGAH)	Rekomendasi	9	120.000.000		Rekomendasi	9	240.000.000
3.25.2.103.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Kegiatan yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Kegiatan	4	2.127.209.023		Kegiatan	4	4.254.418.046
3.25.2.103.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	(KALIMANTAN TENGAH)	Orang	7	1.777.209.023		Orang	7	3.554.418.046
3.25.2.103.2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	(KALIMANTAN TENGAH)	Kelompok	8	150.000.000		Kelompok	8	300.000.000
3.25.2.103.3	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	(KALIMANTAN TENGAH)	Orang	5	100.000.000		Orang	5	200.000.000
3.25.2.103.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	(KALIMANTAN TENGAH)	Kelompok	5	100.000.000		Kelompok	5	200.000.000
3.25.3..	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)				137130,72	31.957.306.570			178269,94	63.914.613.140
....		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)				109,5				109,5	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.3.101.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan yang mendukung Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Kegiatan	3	1.299.283.970		Kegiatan	3	2.598.567.940
3.25.3.101.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	2	310.000.000		Dokumen	2	620.000.000
3.25.3.101.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	3	439.283.970		Unit	3	878.567.940
3.25.3.101.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	3	550.000.000		Unit	3	1.100.000.000
3.25.3.102.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan yang mendukung Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kegiatan	3	1.025.000.000		Kegiatan	3	2.050.000.000
3.25.3.102.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	2	100.000.000		Dokumen	2	200.000.000
3.25.3.102.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	4	100.000.000		Unit	4	200.000.000
3.25.3.102.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	4	825.000.000		Unit	4	1.650.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.3.105.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan yang mendukung Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kegiatan	1	3.746.490.000		Kegiatan	1	7.492.980.000
3.25.3.105.2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	3	3.746.490.000		Dokumen	3	7.492.980.000
3.25.3.106.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Lokasi	7	25.886.532.600		Lokasi	7	51.773.065.200
3.25.3.106.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	(KALIMANTAN TENGAH)	Paket	1	18.360.632.600		Paket	1	36.721.265.200
3.25.3.106.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	2	7.117.900.000		Unit	2	14.235.800.000
3.25.3.106.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	(KALIMANTAN TENGAH)	Layanan	7	408.000.000		Layanan	7	816.000.000
3.25.4..	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)			Ton/Tahun	136.140,63	60.958.341.800		Ton/Tahun	176982,82	121.916.683.600
....		Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)			Ribu Ekor	74.200			Ribu Ekor	96460	
3.25.4.105.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Kabupaten/Kota	14	60.958.341.800		Kabupaten/Kota	14	121.916.683.600
3.25.4.105.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	4	2.000.000.000		Unit	4	4.000.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.4.105.3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	4	708.341.800		Unit	4	1.416.683.600
3.25.4.105.4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	4	55.600.000.000		Unit	4	111.200.000.000
3.25.4.105.5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit	4	1.500.000.000		Unit	4	3.000.000.000
3.25.4.105.6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	2	150.000.000		Dokumen	2	300.000.000
3.25.4.105.7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	(KALIMANTAN TENGAH)	Orang	8	1.000.000.000		Orang	8	2.000.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.5..	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)			%	85	4.796.000.000		%	85	9.592.000.000
....		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok)			Kelompok	48			Kelompok	48	
3.25.5.101.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Lokasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Kabupaten/Kota	14	4.796.000.000		Kabupaten/Kota	14	9.592.000.000
3.25.5.101.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	3	200.000.000		Dokumen	3	400.000.000
3.25.5.101.2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	3	4.300.000.000		Dokumen	3	8.600.000.000
3.25.5.101.3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	3	196.000.000		Dokumen	3	392.000.000
3.25.5.101.4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	(KALIMANTAN TENGAH)	Kelompok	6	100.000.000		Kelompok	6	200.000.000
3.25.6..	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)			Ton/Tahun	35.073,68	1.667.189.225		Ton/Tahun	45595,784	3.334.378.450
....		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)			Kg/Kap/ Tahun	57,62			Kg/Kap/ Tahun	58,62	
....		Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)			%	3,3			%	3,3	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.6.101.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan yang mendukung Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kegiatan	1	100.000.000		Kegiatan	1	200.000.000
3.25.6.101.3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	2	100.000.000		Dokumen	2	200.000.000
3.25.6.102.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Lokasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Kabupaten/ Kota	14	1.267.189.225		Kabupaten/ Kota	14	2.534.378.450
3.25.6.102.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit Usaha	6	250.000.000		Unit Usaha	6	500.000.000
3.25.6.102.2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit Usaha	6	1.017.189.225		Unit Usaha	6	2.034.378.450

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	SATUAN	VOLUME	PAGU		SATUAN	VOLUME	PAGU
3.25.6.103.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan yang mendukung Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kegiatan	3	300.000.000		Kegiatan	3	600.000.000
3.25.6.103.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	6	100.000.000		Dokumen	6	200.000.000
3.25.6.103.2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	(KALIMANTAN TENGAH)	Unit Usaha	7	100.000.000		Unit Usaha	7	200.000.000
3.25.6.103.3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	(KALIMANTAN TENGAH)	Dokumen	5	100.000.000		Dokumen	5	200.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini merupakan usulan Rencana Operasional Fasilitasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 , dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Renja Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan Kelautan dan Perikanan yang bersumber anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyusunan rancangan renja telah mengakomodir aspirasi stake holder Kelautan dan Perikanan dan usulan kegiatan dari Unit Pelaksana Teknis yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan se Kalimantan Tengah. Aspirasi stake holder dan usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah.

Dengan adanya Renja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka penetapan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, baik dengan sesama Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan maupun dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.